

# **BAB 1. PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan dalam bidang Akuntansi Sektor Publik di Indonesia terlihat semakin baik dari tahun ke tahun, terutama seiring dengan implementasi manajemen keuangan daerah. Saat ini, penerapan akuntansi sektor publik telah meluas di berbagai lembaga pemerintah, perusahaan yang dimiliki oleh negara atau daerah, dan organisasi publik lainnya. Pengelolaan keuangan daerah memiliki dampak signifikan terhadap kondisi suatu daerah, memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah, mencapai pelayanan publik yang optimal, serta meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keuangan. Pemerintah telah mengesahkan perundang-undangan dalam bidang keuangan negara untuk mendukung perkembangan ini. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), berdasarkan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 yang merupakan perencanaan keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, APBD dapat berfungsi sebagai pedoman standar untuk menilai kinerja keuangan pemerintah atau instansi tertentu. Oleh karena itu, daerah diharapkan mampu mencari sumber keuangan yang memadai.

Secara umum, lembaga pemerintah memiliki peran khusus dalam menyediakan layanan kepada masyarakat, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo, sebagai entitas yang bertanggung jawab atas tugas menjalankan pemerintahan, memberikan pelayanan, dan memajukan pembangunan masyarakat, memiliki kewajiban untuk mengevaluasi kinerja ekonomi serta efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran daerah. Evaluasi ini merupakan cara untuk mengukur kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo, khususnya dalam aspek keuangan daerah, dan dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air merupakan bagian pelaksana dari otonomi daerah di bidang Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air. Dinas ini dipimpin oleh seorang kepala dinas dan berada di bawah wewenang

bupati, bertanggung jawab dalam menjalankan tugas di bidang Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air. Anggaran merupakan suatu alat penting untuk mengarahkan pembangunan sosial dan pengendalian dalam pemerintahan yang sering dilakukan kurun waktu satu tahun dalam anggaran tersebut berisikan pernyataan mengenai estimasi kinerja. Anggaran sektor publik dibuat untuk digunakan menentukan tingkat kebutuhan masyarakat seperti listrik, air, tingkat kesehatan dan pendidikan, (Mahsun, 2013) Realisasi anggaran adalah proses pelaksanaan yang memungkinkan organisasi publik mencapai tujuannya dengan segala sesuatu yang telah direncanakan dan dianggarkan melalui penambahan dan penggunaan sumber yang efisien. Perkembangan permasalahan rendahnya penyerapan anggaran di Indonesia dalam pelaksanaan belanja pemerintah merupakan situasi yang hingga saat ini masih berlangsung, menjadi permasalahan yang klasik di tingkat Kementerian atau Lembaga, maupun tingkat daerah. Meskipun undang-undang terkait keuangan Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja (APBN) telah disusun oleh penyelenggara sesuai dengan kebutuhan pemerintahan Negara, proporsi penyerapan dana APBN menghadapi kendala lambatnya.

Kegagalan target penyerapan anggaran memang dapat berakibat hilangnya manfaat belanja, karena dana yang dialokasikan sebenarnya tidak semua bisa dimanfaatkan, artinya akan terjadi iddle money (Halim, 2018). Capaian realisasi tidak mencapai target anggaran karena grafik realisasi dengan target tidak menunjukkan keseimbangan yang menyebabkan kurangnya optimalisasi dalam pelaksanaan belanja daerah (Amelinda, Situmorang, & Octavianty, 2020). Apabila pengalokasian anggaran dapat menjadi efisien, maka adanya keterbatasan sumber dana yang dimiliki oleh negara dapat dioptimalkan dengan baik untuk mendanai suatu program tertentu (Hidayat, Sembiring, and Nugraha 2022).

Salah satu OPD yang mengalami kurangnya penyerapan realisasi anggaran belanja yaitu Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air di Kabupaten Sidoarjo. Permasalahan ini bermula munculnya berita media online yang bersumber dari radar sidoarjo pada tahun 2020-2021. Adapun beberapa hal yang mungkin terjadi dalam penyerapan anggaran pada Dinas PUBMSDA

Sidoarjo cenderung rendah dikarenakan adapun kendala dalam lelang yang belum terealisasi ataupun belum berjalan secara keseluruhan. Pada tahun 2019 rendahnya serapan anggaran di Dinas PUBMSDA yakni hanya sebesar 55%

Adapun data terkait Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2018 hingga 2021 berikut ini :

Tabel 1.1 Laporan Realisasi Anggaran

Tahun	Anggaran	Realisasi	Selisih	Percentase
2018	Rp 715.136.602.394	Rp 489.050.459.733,93	Rp 226.086.142.660	68%
2019	Rp 626.878.075.765	Rp 343.161.614.780,32	Rp 283.716.460.985	55%
2020	Rp 235.847.063.267	Rp 107.367.880.539	Rp 128.479.182.728	45,52%
2021	Rp 366.776.971.983	Rp 300.444.409.891	Rp 66.332.562.092	81,91%

(Sumber: bpkad.sidoarjokab.go.id)

Dari data diatas, diketahui penyerapan anggaran selama tahun 2018 hingga tahun 2021 mengalami naik turun (fluktuasi) karena adanya tidak kestabilan mulai tahun 2018-2021 dalam serapan anggaran. Dengan ketidakstabilan atau tidak konsisten dalam penyerapan anggaran selama 4 tahun maka dari itu peneliti mengambil lokasi di dinas pekerjaan umum bina marga dan sumber daya air. Penerimaan anggaran negara yang terbatas mengharuskan pemerintah daerah menyusun prioritas program kegiatan dan mengalokasikan anggaran secara efektif dan efisien. Tinginya penyerapan anggaran kegiatan akan terlaksana lebih cepat. Dan sebaliknya, jika rendahnya realisasi anggaran maka akan ada dana yang menganggur dan mengganggu pertumbuhan ekonomi serta adanya kesempatan untuk menyalahgunakan anggaran. Ketika penyerapan anggaran gagal memenuhi target, maka telah terjadi inefektivitas dan inefisiensi dalam pengalokasian anggaran. Penyerapan Anggaran perlu untuk dicari lebih lanjut yang dapat mengakibatkan serapan anggaran menjadi tidak efektif dan efisien. Cara ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat ukur kinerja untuk mengetahui keberhasilan dalam mencapai tujuan, kegiatan yang dijalankan dan menentukan kriteria dalam menilai keefektifan dan efisiensi dengan pendekatan studi kasus.

Naik turunnya tingkat efektivitas disebabkan karena realisasi anggaran tidak tercapai dan tidak sesuai target yang telah ditetapkan (Waney, Saerang, & Alexander, 2018). Kinerja yang efektif dapat mencerminkan apakah suatu

kegiatan telah berhasil atau gagal dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan mampu mengembangkan indikator kinerja yang memadai. Pola penyerapan anggaran yang menjadi strategi optimalisasi anggaran dalam pengertiannya adanya beberapa faktor utama yang mempengaruhi penyerapan anggaran (Priyantono et al., n.d, 2017). Untuk mencapai kinerja optimal dalam pengelolaan anggaran, diperlukan komitmen yang tinggi untuk mengarahkan, mengonsolidasi, dan mengelola sumber daya dengan efektif.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini ditujukan untuk meneliti terkait **“Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018-2016” ?.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis tingkat efektivitas dan efisiensi penyerapan anggaran di Dinas Pekerjaan Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupten Sidoarjo.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan manfaat untuk :

### **1. Bagi Peneliti**

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai sarana dapat meningkatkan wawasan peneliti dalam menganalisis dan mengimplementasikan teori yang sudah diperoleh selama perkuliahan serta dapat mengetahui sumber

penyerapan anggaran khususnya pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo.

2. Bagi Pemerintah Daerah dan Instansi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dan bahan informasi serta meningkatkan dalam pencapaian kinerja yang berfokus pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi tambahan dan pertimbangan untuk melakukan penelitian selanjutnya yang terkait dengan analisis efektivitas dan efisiensi serapan anggaran dalam organisasi publik.